



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN, DAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.55 s.d. 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
45 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Sukur H. Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. Sri Rahayu
8. Ir. Effendi Sianipar
9. Harvey B. Malaihollo
10. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
11. Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.

3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

6 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
4. Drs. H. Soehartono, M. Si.
5. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
4. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Willem Wandik
3. Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
4. Lasmi Indaryani, S.E.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekjen Kementerian Perhubungan RI (Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA.)
2. Sekretaris Irjen Kementerian Perhubungan RI (Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.)
3. Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI (Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc.)
4. Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI (Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc., QGIA., CGCAE.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, dengan Sekjen, Irjen, Kepala BKT, BKT ini Badan Kerjasama, *oh* Badan Kebijakan Transportasi, ini dulu badan baru, Pak, ya. *Oh*, Balitbang dulu, oke nanti dijelaskan, Pak. Soalnya saya sendiri sebagai Ketua Komisi *kok* agak asing, sejak kapan *gitu*.

Ya, kemudian dengan selain dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan Kebijakan Transportasi atau BKT, dan Kepala BPSDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Pada hari ini Rabu, 25 Januari 2023. Rapat sedianya tadi pukul 14.00, kita sekarang di 14.55, kita terlambat 55 menit ya, mohon maaf, atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V. Pak Sekjen, mohon maaf tadi bersama rekan-rekan menunggu agak lama di luar.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen, Irjen, Kepala Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kementerian Perhubungan beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan

rapat sesuai jadwal yang sudah kita tetapkan pada hari ini, 25 Januari 2023. Rapat ini dihadiri baik masih secara fisik maupun juga secara virtual. Menurut data dari Sekretariat, rapat ini secara fisik dihadiri oleh 20 Anggota dan virtual 15 Anggota, total 35 orang Anggota dari 8 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan mengacu kepada ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.55 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan Kementerian Perhubungan yang hadir pada undangan kami pada kali ini.

**Pimpinan dari Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,
Beserta seluruh hadirin yang kami hormati,
Pak Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan yang kami hormati.**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 18 Januari yang lalu, Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan. Dan, sebagainya tidak lanjut hari ini dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I, yang mana pada kali ini kita mengundang Pak Sekjen, kemudian Kepala BPSDM, Kepala Inspektorat Jenderal, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Teman-teman sekalian, untuk Pak Irjen atau Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan berhalangan ya, ini diwakili oleh Sekretaris ya, karena pentingnya rapat hari ini dan sudah kita jadwalkan waktu kita yang terbatas, maka saya mohon persetujuan dulu ini bahwa, Pak Irjen boleh diwakilkan oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, jangan ada yang protes lagi.

Bapak-Ibu sekalian, untuk agenda pertama terkait Evaluasi APBN Tahun 2022, agenda kita yang utama pada hari ini. Kemudian, Komisi V DPR RI ingin mendengarkan pendapat, apa *pan*, informasi, penjelasan dari Sekjen, Irjen, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2023. Demikian juga Komisi V DPR RI, ingin membahas secara bersama persiapan atau informasi sejauh mana APBN Tahun 2023 ini dipersiapkan, ya. Tentu belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk kiranya Anggaran Tahun 2023 ini serapannya bahkan bisa lebih baik. Karena Kementerian Perhubungan ini luar biasa, Pak, kemarin Bapak kita harus kasih *applause* dulu *nih*, Kementerian Perhubungan

serapannya 99 koma sekian persen, kita kasih *applause*, ya. Tertinggi dari seluruh Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V, Pak. Dan, menurut saya Pak Sekjen ini sesuatu yang *surprise*, ya, buat kita ya, karena tidak mudah, Pak, untuk meraih capaian di posisi 99 koma sekian persen untuk serapan tahun anggaran berjalan.

Bapak-Ibu sekalian, ya. Sebagaimana di rapat-rapat terdahulu bahwa sudah kita ketahui untuk anggaran Setjen sebesar 505 miliar, Irjen sebesar 87 miliar ya, untuk Tahun 2023 ya, kemudian Badan Kebijakan Transportasi anggarannya 174 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan anggarannya sebesar 3,7 miliar *eh* 7 triliun, *sorry*. Untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan anggarannya 3,7 triliun.

Dengan anggaran yang ini kami ingin mengetahui penggunaan dan pemanfaatan dari anggaran tersebut untuk mencapai Program Kegiatan Prioritas Nasional pada masing-masing Unit Eselon I di Tahun Anggaran 2023 ini.

Bapak-Ibu sekalian, Pak Sekjen, Irjen, Kepala BKT, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala BPSDM ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami yang ingin kami sampaikan juga dalam rapat pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi optimalisasi daya serap anggaran untuk program strategis nasional pada Sekjen, Irjen, dan Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan RPJMN 2020-2024 Kementerian Perhubungan, nanti kami perlu mendapat penjelasan.

Yang kedua, penguatan koordinasi dan tata kelola baik internal maupun eksternal agar tercapai sistem pola kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga, peningkatan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan keuangan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tentu ini adalah tugas utamanya Inspektur Jenderal.

Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengembangkan inovasi, profesionalitas, dan kompetensi kerja yang berintegritas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini tentu tugas utamanya BPSDM. Dan yang kelima, hasil penelitian dan pengembangan agar lebih berperan dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis sebagai turunan dari hasil kerja dari BP, apa, dari Badan, dari BKT (Badan Kebijakan Transportasi) ya, terkait dengan meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi,

Barangkali itu, pengantar rapat pada hari ini, untuk selanjutnya kami beri kesempatan secara bergantian nanti dimulai dari Pak Sekjen.

Saya persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARJO, MSEA):

Bismillairrahmanirrahim.

Terima kasih, Bapak Ketua, atas kesempatannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua beserta Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Irjen, KBPSDM Perhubungan dan KBKT, serta hadirin
dan undangan yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Valuasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI atas dukungan, sinergi, dan kolaborasi yang baik selama ini, sehingga terbangun kemitraan yang kondusif dalam mendorong kemajuan sektor transportasi nasional.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Sesuai dengan agenda rapat dengar pendapat pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pemaparan secara singkat perihal Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 pada Sekjen sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Sekjen bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait kegiatan Kementerian Perhubungan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setjen terdiri dari 15 unit kerja, yaitu 7 biro, 5 pusat, dan 2 lembaga nonstruktural, serta 8 atase berhubungan yang ada di Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, Den Haag, London, Montreal, Washington, dan Jeddah. Di Tahun 2022 yang lalu terjadi perubahan pada Pagu Setjen dari Paku awal 2022 sebesar 505,37 miliar menjadi 485,12 miliar. Hal ini antara lain disebabkan karena terdapat kebijakan penambahan belanja pegawai sebesar 447,1 juta dan pengurangan akibat relokasi AA ke BA-BUN sebesar 20,69 miliar.

Adapun Realisasi Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022 berdasarkan pencatatan dalam aplikasi SPAM Kemenkeu adalah sebesar 99,58% dengan realisasi belanja pegawai sebesar 99,4%, belanja barang 99,6%, dan belanja modal sebesar 99,9%. Adapun realisasi PNBPN untuk Setjen Tahun 2022 sebesar 7,374 miliar atau mencapai 219,70% dibandingkan target sebesar 3,356 miliar. Capaian ini meningkat dari Realisasi Tahun 2021 yang sebesar 6,597 miliar. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi pemulihan setelah pandemi tidak menyurutkan semangat kami untuk dapat mewujudkan target PNBPN yang telah ditetapkan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selain capaian dapat bentuk kinerja pada kesempatan ini juga izinkan saya melaporkan beberapa capaian yang lain yang diraih Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022, antara lain meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021, ini 9 kali berturut-turut. Kemudian penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Tempo Ministry Award kategori pengelolaan komunikasi dan media massa dalam ajang TMA 2022. Penghargaan peringkat terbaik pertama dalam Anugerah Layanan Investasi atau ALI 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi BKPM pada bulan Oktober 2022. Penghargaan Bhumandala Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022, simpul jaringan terbaik katagori Kementerian/Lembaga (Bhumandala Ariti) pada bulan November 2022.

TOP CEO On Digital Implementaion 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works. Penetapan Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan sebagai unit kearsipan terakreditasi A atau sangat baik, dengan nilai akreditasi 87,45 berdasarkan keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Pengharagaan pengelolaan komunikasi publik dan media masa terbaik dalam Tempo Ministry Award. Mempertahankan sertifikasi ISO 27001 dalam rangka penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Hasil audit monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2022 sebesar 87,2655% dengan kualifikasi "menuju informatif" yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan katagori lembaga nonstruktural.

Capain ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja, berkarya, dan melakukan pelayanan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan Rencana Anggaran dan Program Kerja Setjen Tahun 2023. Dari total Pagu alokasi Setjen sebesar 541,15 miliar terdiri atas komposisi, belanja pegawai sebesar 22,84% atau 123,61 miliar, belanja barang operasional sebesar 31,24% atau 169,06 miliar, belanja barang non operasional sebesar 35,50% atau 191,95 miliar, belanja modal rupiah murni sebesar 10,41% atau 56,52 miliar.

Berdasarkan postur anggaran alokasi Setjen, anggaran unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut. Biro Perencanaan 32,89 miliar, Biro SDM dan Organisasi sebesar 18,13 miliar, Biro Keuangan sebesar 18,81 miliar, Biro Hukum 13,5 miliar, Biro Umum sebesar 245,58 miliar, Biro KIP sebesar 26,36 miliar, Biro LPPBMN sebesar 22,49 miliar, PFKKI sebesar 13,39 miliar, PPTB sebesar 13,5 miliar, Pustikom sebesar 59,81 miliar.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, mohon izin, Pak, mungkin Bapak *nggak* perlu baca semua kan kami sudah ada datanya, ya mungkin Bapak, 4 orang ini. Takut kita nabrak magrib, intisari, target, sebelum magrib kita sudah bisa selesai. Yang sifatnya data seperti ini kami bisa baca, Pak.

Silakan dilanjut, Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARJO, MSEA):

Terima kasih, Bapak Ketua, atas arahnya kami laksanakan. Jadi, bisa kita lihat di-*screen* untuk lebih detailnya.

Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa anggaran unit kerja baru Setjen, yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, saat ini sedang dalam proses revisi anggaran.

Terkait Program Kerja Tahun 2023 dapat kami sampaikan kronologis penyusunan RKA Sekretariat Jenderal Tahun 2023 mulai dari Renstra 2020 sampai dengan 2024 untuk Tahun 2023 sebesar 956 miliar, kemudian dibahas Pagu kebutuhan sebesar 1,353 triliun. Dari nilai tersebut kemudian pembahasan Pagu indikatif, Pagu anggaran sampai akhirnya ditetapkan Pagu alokasi anggaran dalam RKA Kemenhub dengan jumlah sama sebesar 541,15 miliar.

Di Tahun 2023 ini terjadi perubahan pada Pagu Sekretariat Jenderal dari Pagu awal sebesar 541 efektif menjadi 531,92 miliar. Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena terdapat kebijakan AA atau *automatic adjustment* sebesar 9,23 miliar. Selanjutnya, berdasarkan *exercise* dan proyeksi yang kami lakukan

pada Tahun 2023 ini, PNBPN Setjen ditargetkan sebesar 4,09 milia dan prognosa pencapaian PNBPN *insya Allah* dapat mencapai 100% target.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Secara umum sebagaimana yang ada di *screen* adalah organisasi di bawah Sekretariat Jenderal ada beberapa biro dan beberapa lembaga tadi yang sudah kami sampaikan, kami tidak akan baca detail tapi sudah ada di *screen* dan sudah kami bagikan.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Menteri Perhubungan, kami akan melakukan percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 ini dengan mendorong percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan melakukan mitigasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Kami optimis dengan semangat kebersamaan dan dukungan serta sinergi dari seluruh jajaran Kementerian Perhubungan *insya Allah* capaian kinerja Tahun 2023 ini akan lebih baik lagi.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan pada agenda rapat dengar pendapat ini. Selanjutnya kami mohon masukan, saran, dan arahan dari Pimpinan dan Anggota untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja Sekjen Kementerian Perhubungan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Sekjen.

Demikian, paparan dari Sekjen Kementerian Perhubungan pada rapat dengar pendapat kali ini. Dilanjutkan sekarang saya persilakan Pak Kepala BPSDM, Pak Djoko. *Monggo*, Pak, silakan.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Salam sehat.

Izinkanlah kami melaporkan, pertama tentunya kita mensyukuri bisa hadir pada undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI. Dengan demikian kami ingin menyampaikan hal-hal yang tentunya ini hasil daripada dukungan, arahan, dan masukan daripada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Kami sangat berterima kasih atas dukungan, arahan, dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI bahwa di Tahun 2022, *alhamdulillah* BPSDM dapat melaksanakan 99,28% dari anggaran yang dialokasikan. Artinya ini sedikit di atas target yang selama ini kita pegang, yaitu 98,75%.

Hal lain yang kami laporkan bahwa dari hasil pendapatan negara bukan pajak dan juga BLU, *alhamdulillah* kami bisa melampaui target untuk PBNP adalah sebesar 158,04% dan BLU adalah 102,92%.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Kami juga ingin melaporkan bahwa terkait dengan *output* dari pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat maupun Padat Karya, kami realisasinya untuk peserta *alhamdulillah* bisa 108% dengan anggaran 92%. Artinya ada efisiensi yang kita bisa raih sesuai dengan dukungan, arahan, dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Izinkan kami melaporkan bahwa terkait Realisasi Program Padat Karya Tahun 2022 terdiri dari 88 kegiatan yang tersebar di 29 satker, di 15 provinsi, dan mencakup 23 kota kabupaten yang tentunya kita harapkan nanti bisa menyentuh masyarakat-masyarakat yang memang perlu mendapatkan, apa, bantuan terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

Terkait dengan hal ini, izinkan kami melakukan terkait dengan target indikator kinerja program capaian indikator kinerja kegiatan pertama terkait dengan jumlah diklat sebanyak 118,5%, kemudian terkait dengan persentase jumlah diklat vokasi yang bersertifikat mencapai 143,01%. Sedangkan, persentase penyerapan diklat pembentukan vokasi sebesar 81,22%. Sedangkan, kami juga membuat program yang tentunya rintisan, yaitu S2 *double degree*, S3 *double degree*, dan juga program regular.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Selanjutnya, kami sampaikan program kerja BPSDM Perhubungan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023, khususnya pada Program Prioritas Nasional 3 tentang meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada kegiatan diklat vokasi dan pemenuhan sarana, prasarana, serta program prioritas nasional kelima tentang memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Total Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 3,6 triliun dengan rincian sebagai berikut. Untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 68,05% atau setara dengan 2,49 triliun serta program dukungan manajemen sebesar 31,95% atau Rp1,17 triliun. Dari belanja ini untuk belanja pegawai sebesar 8,88%, kemudian belanja barang operasional 17,11%, dan belanja non operasional sebesar 55,29%, serta belanja modal sebesar 18,72%. Anggaran ini bersumber dari rupiah murni sebesar 60,33%, serta dari BLU sebesar 31,51%, lainnya adalah dari PNBPN dan SBSN. Sehingga, di dalam pelaksanaan kami terkena *automatic adjustment* sebesar 117,3 miliar dan akhirnya total akhir anggaran BPSDM Tahun Anggaran 2023 yang kami bisa laksanakan sebesar Rp3,494 triliun.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Dapat kami laporkan bahwa BPSDM Perhubungan tetap fokus dalam penyediaan SDM transportasi yang berkualitas dengan melaksanakan kegiatan strategis dan melaksanakan prioritas anggaran BPSDM Perhubungan, antara lain untuk akreditasi lembaga, kegiatan penyusunan kurikulum, silabus, dan bahan ajar, dan kegiatan lainnya khususnya kegiatan beasiswa, serta S2 terapan.

Sedangkan, untuk Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023 yang mendukung PN3 serta PN5 untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar telah teranggarkan sebesar Rp1,5 triliun dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Untuk bangunan diklat vokasi sejumlah 27.229 orang, kemudian untuk pemenuhan diklat pemberdayaan masyarakat sejumlah 102.620 orang, serta pemenuhan Sarpras sejumlah 36 unit. Total anggaran pemenuhan Sarpras prioritas nasional maupun non prioritas nasional sebesar 693 miliar atau 18,92% dari total anggaran BPSDM Perhubungan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Kami laporkan sebaran anggaran Satker BPSDM Perhubungan per provinsi mulai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga ke Papua. Dapat kami laporkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dukungan diklat, Kementerian Perhubungan memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang bersumber dari SBSN pada Tahun 2023 antara lain, pembangunan gedung penunjang akademik di PIP Makassar, kemudian pembangunan gedung kelas di Poltrada Bali, serta pengadaan peralatan penunjang dengan diberikan vokasi di 6 Satker BPSDM Perhubungan. Total semuanya adalah 260 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Dapat kami laporkan juga Kegiatan Prioritas Nasional BPSDM yang menyentuh lapisan masyarakat, antara lain program pendidikan vokasi melalui taruna pola pembinaan dengan total peserta 13.813 orang dengan anggaran

sebesar 466,7 miliar. Sehingga total persentase taruna pola pembinaan BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2023 sebesar 50,54%.

Dapat kami laporkan juga kegiatan prioritas nasional BPSDM Tahun Anggaran 2023, lainnya melalui pelaksanaan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat atau DPM yang terbesar di 34 provinsi di Indonesia melalui 25 Satker secara konsisten juga terus dilaksanakan dengan target peserta sebanyak 102.630 peserta yang tadi sudah disebutkan, dengan total anggaran sebesar 217 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Dapat kami laporkan pula sebaran belanja modal pemenuhan sarana dan prasarana prioritas nasional dan nonprioritas nasional di Tahun 2023 di atas 10 miliar (suara kurang jelas). Serta total anggaran pembangunan sarana dan prasarana prioritas nasional di atas 10 miliar (suara kurang jelas), sebesar 60,31%.

Dapat kami laporkan juga terkait dengan rencana kegiatan target BPSDM Tahun 2023 melalui program pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan padat karya yang tersebar di 34 provinsi dari 27 Satker, dengan total anggaran sebesar 5,9 miliar secara ini terdapat pada peta sebaran sebagai berikut.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Demikian yang dapat kami laporkan, kami mohon dukungan, arahan, dan masukan agar kami bisa melaksanakan Tahun Anggaran 2023 secara baik dan akuntabel.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Kepala BPSDM.

Sekarang, ke Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Kami persilakan, Pak.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Ketua Komisi V,
Para Wakil Ketua, Anggota Komisi V,
Serta Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia.**

Sesuai arahan Pimpinan, izinkan kami menyampaikan sedikit pengantar berkaitan dengan transformasi kelembagaan dari Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Jadi, sejak Tahun 2018 memang sudah ada arahan untuk melakukan redesain, organisasi Badan Litbang dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya, Tahun 2019 sudah mulai dikaji dan Tahun 2020 arahan Bapak Pimpinan, Pak Menteri Perhubungan tadinya Badan Litbang diharapkan bertransformasi sebagai Badan Kebijakan Transportasi seperti halnya dengan BKF di Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan sebagai salah satu yang menjadi mentoringnya daripada organisasi BKT ini.

Selanjutnya, pada Tahun 2021 dilakukan persiapan dan Tahun 2022 melalui penerbitan Perpres Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, dan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tenaga Kerja Kementerian Perhubungan, maka disahkanlah Badan Litbang Perhubungan ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Dengan Tusi, *next*, dengan Tusi secara umum adalah menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, tugas pokoknya adalah membantu Pimpinan dalam hal ini Menteri Perhubungan dan Kementerian Perhubungan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perhubungan.

Adapun struktur organisasi BKT ini, terdiri pada 5 Eselon II dengan Sekretariat Badan, kemudian ada pusat kebijakan sarana transportasi, pusat kebijakan prasarana transportasi dan integrasi muda, pusat kebijakan lalu lintas angkutan dan transportasi perkotaan, serta pusat kebijakan keselamatan dan keamanan transportasi, di bawahnya, langsung di bawah jabatan fungsional.

Agenda kerja dan metodologi kerja, *next*, pada prinsipnya sesuai dengan metodologi kebijakan publik memang langkah pertama ditetapkan agenda *setting* yang ditentukan bisa dari direktif menteri, dinamika kebijakan yang berkembang, maupun situasional yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan ditetapkannya agenda *setting* dilakukan *policy formulation*, kemudian dilakukan pembahasan, di mana BKT ini kalau diibaratkan sebuah orchestra musik, dia sebagai dirigen, Bapak Pimpinan. Di mana para pemainnya ya, stakeholder yang terkait, kami juga melibatkan banyak narasumber, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tentu saja pemilik risiko dalam hal ini adalah subsektor badan terkait. Hasilnya merupakan rekomendasi kebijakan kepada Pimpinan, kepada Menteri Perhubungan, yang dilanjutkan, selanjutnya diterapkan oleh Unit Eselon I.

Tugas BKT selanjutnya adalah melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian secara singkat kalau kita *summary*, Bapak Pimpinan, kelebagaannya Litbang menjadi BKT, SDM utamanya adalah peneliti dulu sekarang menjadi analis kebijakan, kemudian metode kerjanya penelitian kalau Balitbang, kalau BKT bersifat analis kebijakan. *Output*-nya adalah kalau Litbang adalah penelitian, kalau BKT adalah rumusan atau rekomendasi kebijakan. Demikian, Bapak Pimpinan, secara sekilas kami laporkan mengenai transformasi BKT.

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan sesuai dengan agenda hari ini, terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022. Dapat kami laporkan bahwa Badan Kebijakan Transportasi sejak awal memperoleh DIPA 174,3 miliar, yang kemudian mengalami perubahan dan komposisi menjadi 97,2 miliar. Hal ini disebabkan karena pertama terjadi pengalihan, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, dan para Anggota, sebanyak 67,3 miliar ke BRIN. Jadi anggaran BKT ditransfer ke BRIN sejumlah 67,3 miliar. Kemudian, mengalami *automatic adjustment* sebagaimana yang lain ke BA-BUN sebesar 9.8 miliar. Realisasi per 30 Desember sebesar 99,77%, realisasi ini lebih tinggi daripada Prognosa Tahun 2022 yang 99,54%. Dan, ini juga melebihi daripada realisasi pada Tahun 2021 yang 98,99%.

Selanjutnya, kami laporkan juga *output* daripada Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun 2022, itu telah menghasilkan 44 kebijakan, rekomendasi kebijakan yang juga termasuk di dalamnya 11 penugasan strategis dari Menteri Perhubungan berkaitan dengan *current issue*, antara lain terkait dengan PNBPN sektor transportasi laut. Jadi, kami laporkan kami BKT juga berkontribusi membantu teman-teman subsektor laut untuk meningkatkan PNBPN. Kemudian, membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pembangunan kereta api Makassar-Pare-Pare, ikut mengawasi *high speed train* Jakarta-Bandung, dan juga bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi merumuskan percepatan-percepatan dan sinergi berkaitan dengan program dan kebijakan transportasi yang bersifat nasional.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan serta mencermati saran-saran konstruktif dari para Anggota Komisi V, maka pada Tahun 2022 ini BKT juga melakukan sejumlah program kerja sama yang telah dirintis sebelumnya, di antaranya kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang navigasi (AirNav) kemudian juga kerja sama dengan PT. PAL di bidang pelayaran. Kerja sama ini merupakan strategi kami memang sebagaimana kami sampaikan tadi dalam rangka memperkuat rumusan-rumusan pada saat kita menyusun formulasi kebijakan, sehingga nantinya bisa meminimalkan hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan.

Bapak Pimpinan Komisi V yang saya hormati dan Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan Anggaran Tahun 2023 dapat kami laporkan, DIPA BKT Tahun 2023 sebesar 164,69 miliar, hal ini sekitar 0,49% dari total

anggaran Kementerian Perhubungan. Dan, berdasarkan relokasi ini terbagi atas program infrastruktur konektivitas sebesar 87,41 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar 77,27 miliar. Dengan rincian, belanja pegawai 35,53 miliar, belanja barang operasional 23,18 miliar, dan belanja barang non operasional sebesar 105,97 miliar.

Adapun komposisi alokasi pada Unit Eselon II, yakni sebesar sebagai berikut. Sek.Badan 75,64 miliar yang di dalamnya yang termasuk juga, termasuk belanja pegawai yang kami sebutkan tadi 35,53 miliar. Dengan demikian, rata-rata daripada Unit Eselon II di BKT ini masing-masing pusat kebijakan, berkisar 22 koma sekian miliar setiap Unit Eselon II-nya.

Dapat kami laporkan juga bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan per tanggal 9 Desember, perihal *automatic adjustment* sama dengan yang lain BKT juga mendapat komposisi, rekomposisi atau pengurangan sebesar 3,94 miliar atau sekitar 3% dari Pagu Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023, sehingga Pagu Efektif hanya 160,75 miliar.

Adapun progres penyerapan hingga saat ini per 24 Januari sudah baru berkisar 2,36%. Dan, kami menyusun prognosa pada akhir 2023 ini sebesar 99,17%. Dan, kami sangat yakin bisa akan memenuhi atau mencapai prognosa tersebut.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati dan Bapak-Ibu sekalian,

Secara garis besar target *output* yang akan dihasilkan oleh BKT di Tahun 2023 ini sebanyak 39 kebijakan strategis yang intinya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendukung program prioritas nasional. Kemudian, ada 6 *major project* yang berkaitan dengan RPJMN dan juga berkaitan dengan *project* IKN, masih mengawal kereta cepat Jakarta-Bandung, destinasi pariwisata prioritas, pengembangan kawasan, dan juga termasuk kami menyiapkan 20 kebijakan direktif yang kami antisipasi berkembang selama Tahun 2023 ini. Jadi, kami alokasikan anggaran tertentu, sebagaimana kami sampaikan bahwa agenda *setting* itu kita akan petakan sesuai dengan dinamika yang berkembang selama tahun bersangkutan.

Dalam struktur Anggaran Tahun 2023, BKT ini memiliki 5 kluster kegiatan koordinasi, di samping ada kegiatan tadi juga ada kegiatan koordinasi yang berawal dari kita sebut dengan agenda *mapping*, kemudian nanti ada advokasi kebijakan, kemudian termasuk juga monitoring evaluasi, dan termasuk nanti juga berkaitan dengan diseminasi kebijakan di beberapa daerah.

Bapak-Ibu sekalian, sama dengan Tahun 2022, Tahun 2023 kami juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan lembaga dalam rangka memformulasikan kebijakan tersebut, antara lain ini tidak terbatas pada universitas ini, Bapak. Tapi pada prinsipnya sangat dinamis kalau memang isu tersebut mungkin nanti akan ada di Papua, tentu akan kami melibatkan universitas yang ada di Papua, kalau itu di Ambon ya, kita akan melibatkan

universitas cendekiawan kita atau narasumber kita dari Universitas Pattimura. Ini hanya *listing* saja, antara lain Hasanuddin, ITS, ITB, Undip, dan juga UGM, dan termasuk juga beberapa perguruan tinggi yang lain.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, yang dapat kami laporkan. Mohon arahan lebih lanjut, semoga kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik dan benar.

Kami akhiri,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

Terima kasih, Pak I Gede Pasek, Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Selanjutnya, saya persilakan mewakili Inspektur Jenderal, Ibu Sekretaris, Inspektur Jenderal Ibu Jujun Indah Wahjuningrum. Betul, Ibu, namanya, Ibu? Jujun Indah Wahjuningrum, baik, Jujun Endah Wahjuningrum. Kalau Pak Dewo perlu nomor telepon nanti saya kirim.

Terima kasih, Ibu, kami persilakan.

SEKRETARIS IRJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sehat untuk kita semua,

**Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Kepala BPSDM, Bapak Kepala BKT,
Serta hadirin yang berbahagia,**

Mohon izin, mewakili Bapak Inspektur Jenderal yang berhalangan hadir pada rapat dengar pendapat hari ini. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam rangka

membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023.

Selanjutnya mohon berkenan kami untuk menyampaikan penjelasan secara garis besar tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Jenderal sebagai berikut. Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar 87,6 miliar dan selama pelaksanaan anggaran berjalan alokasi anggaran Itjen mengalami perubahan dan penambahan sebesar 9,9 miliar, sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal menjadi 97,5 miliar. Dengan rincian rekomposisi atau penambahan belanja pegawai sebesar 4,6 miliar, penambahan belanja barang operasional untuk pencegahan covid 19 sebesar 5,2 miliar.

Sebagaimana kebijakan pemerintah Tahun Anggaran 2022, terkait dengan pencadangan anggaran atau *automatic adjustment* yang dilakukan mulai pencatatan halaman 4 DIPA, Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal yang dilakukan *automatic adjustment* sebesar 10,5 miliar, sehingga total anggaran Itjen yang dapat dilaksanakan setelah dikurangi *automatic adjustment* sebesar 87,13 miliar. Realisasi Anggaran Itjen Tahun Anggaran 2022 mencapai 98,88% atau sebesar 86,15 miliar.

Pak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang kami hormati,

Realisasi capaian kinerja *output* pengawasan intern, baik *assurance* maupun *consulting* Tahun 2022, telah mencapai 768 *output* dengan rincian audit kinerja 100% tercapai, evaluasi 158% tercapai dengan 19 *output*, pemantauan 177 *output*, untuk pelaksanaan *review* 324, ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu) 35 *output*, dan pengawasan lainnya sebesar 104 *output*.

Jumlah pengaduan yang ditangani Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 sebanyak 135 pengaduan dari total pengaduan yang masuk sebesar 146. Di mana mayoritas pengaduan terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan capaian kinerja terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI posisi Semester II Tahun 2022 telah menuntaskan 85,01% tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini merupakan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas rata-rata nasional Semester I, sebesar 77,38%.

Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal juga berhasil melakukan penghematan uang negara dengan pelaksanaan *review* HPS dengan rata-rata sebesar 6,38% atau senilai 1,8 triliun dari usulan sebesar 28,16 triliun. Inspektorat Jenderal telah melakukan proses atau pelaporan gratifikasi yang telah terverifikasi dan diteruskan kepada KPK serta mendapatkan status penetapan menjadi barang milik negara. Dan, berdasarkan hasil survei penilaian integritas KPK Tahun 2022, Kementerian Perhubungan mencapai nilai 75,18 di atas nilai rata-rata nasional sebesar 71,94.

Inspektorat Jenderal juga mendukung tercapainya zona integritas di lingkungan Kemenhub, melalui pendampingan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada

Tahun 2022, Kementerian Perhubungan berhasil meraih 3 Predikat WBK dari Politeknik Transportasi Darat Bali, Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Sebagai aparat pengawas intern pemerintah, Itjen akan terus berupaya meningkatkan fungsi sebagai pengawas intern, dalam rangka memperkuat peran Itjen sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor*, serta mendukung dan mengawal kebijakan dan program kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2023 melalui pola pengawasan yang bersifat *assurance* dan *consulting* dengan mengoptimalkan peran *insight* dan *foresight* terhadap kegiatan yang sifatnya strategis, direktif, dan menjadi prioritas Kementerian Perhubungan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan *ter-delivery*, termasuk pengawasan dan aspek kemanfaatan akuntabilitas dan tata kelola.

Ruang lingkup pengawasan Itjen meliputi 585 objek pengawasan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari mulai kantor pusat, UPT di daerah, dan terdiri dari 60.000 pegawai Kemenhub. Alokasi APBN Kemenhub sebesar 33,4 triliun dengan potensi PNPB sebesar 9,6 triliun, serta 40 proyek strategis nasional, 254 proyek prioritas nasional, dan 2.071 kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Untuk Tahun 2023, Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar 96,6 miliar atau sebesar 0,29% dari total Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan sebesar 33,4 triliun. Dengan rincian komposisi anggaran per jenis belanja, belanja pegawai sebesar 38,8 miliar atau 40% untuk belanja gaji dan tunjangan 335 pegawai. Belanja barang operasional sebesar 5,9 miliar, antara lain untuk belanja pemeliharaan, pengadaan pakaian dinas, honorarium pengemudi, pramubakti, dan sebagainya. Belanja barang nonoperasional sebesar 47,0 miliar, yang terdiri dari 27,2 miliar untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, 19,8 miliar untuk pengembangan kompetensi SDM, dukungan teknologi informasi pengawasan, kemitraan kerja sama bidang pengawasan, dan tata kelola pegawai intern. Sementara untuk belanja modal sebesar 4,7 miliar atau sebesar 4,8% untuk pengadaan peralatan digital forensik, peralatan sarana bantu audit, perlengkapan sarana kantor dan pengembangan sistem informasi pengawasan.

Sesuai surat Menteri Perhubungan Nomor KU0022116/Perhubungan/2022, tanggal 14 Desember 2022, *automatic adjustment* belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi, *automatic adjustment* sebesar 2,0 miliar atau sebesar 2,08% dari Pagu Belanja, sehingga Pagu Efektif yang dapat digunakan 94,6 miliar.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern, inspektorat jenderal didukung dengan sumber daya manusia 339 orang, terdiri dari 160 orang auditor dan pemangku jabatan fungsional sebanyak 179, 160 orang nonauditor, 179 jabatan fungsional auditor. Sumber daya teknologi informasi, antara lain, Sistem Informasi Audit (SIAU), Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU), berbasis *web* dan *mobile*, Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON), berbasis *web* dan *mobile*, Sistem Informasi Prestasi dan Cella (SISILA), serta Sistem Informasi....

KETUA RAPAT:

Mohon izin, Bu, mungkin mic-nya bisa didekatkan lagi, kita kurang mendengar ini.

Silakan, Bu.

SEKRETARIS IRJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA.):

Dalam mendukung tugas-tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal juga didukung dengan sumber daya teknologi informasi, antara lain Sumber Daya Teknologi Informasi Audit atau kita sebut SIAU, Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU) berbasis *web* dan *mobile*, Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON) berbasis *web* dan *mobile*, Sistem Informasi Prestasi dan Cella atau kita sebut SISILA, dan Sistem Informasi Pelaporan Unit Kepatuhan Internal, kita sebut SILUKI, juga Sistem Informasi Monitoring Pelaporan Harta Kekayaan, kita sebut Simpanan Berharga, dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Adapun fokus pengawasan Itjen Tahun 2023, pengawasan berbasis risiko melalui pemetaan risiko, *remote* audit, dan mandatori. Kemudian, pengawasan berbasis prioritas terhadap arah kebijakan Kementerian Perhubungan, proyek strategis nasional, proyek prioritas subsidi, tata kelola, pelayanan publik, dan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian kementerian.

Yang ketiga, berdasarkan peningkatan peran *insight* dan *foresight* melalui pemantauan, pendampingan, peningkatan *good governance*, implementasi sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko dan penguatan unit kepatuhan internal, dengan menerapkan *3 line of model*, *three line of model* ini, mengutamakan pengawasan intern dari pelaku sampai ke unit kerja berikutnya, Unit Kerja Eselon I dan terakhir adalah lini dari inspektorat jenderal.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Demikian penjelasan umum yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat dengar pendapat kali ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan dukungan, saran, dan masukan Pimpinan beserta Anggota Dewan, guna peningkatan kinerja dan kualitas layanan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Sekian.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om santi santi santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

KETUA RAPAT:

Baik,

Bapak-Ibu sekalian, demikian penyampaian paparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, kemudian Kepala BPSDM, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi dari Kementerian Pekerjaan, dari Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya kita melakukan pendalaman ya, mudah-mudahan ini bisa kita percepat prosesnya. Nanti kami berharap yang sifatnya pertanyaan yang detail kemudian data, Pak Sekjen, ya nanti mungkin jawaban tertulis saja yang *urgent* mesti dijawab, dijawab nanti pada rapat kali ini, itu mungkin saya ingatkan dari awal. Sama seperti tadi, ketika kami dengan Irjen SDA dan Perumahan Kementerian PUPR.

Untuk mempersingkat waktu saya persilakan yang pertama, Ibu Sri Rahayu.

Silakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati semuanya,

Saya langsung, Ibu, yang terakhir dari perwakilan dari Irjen, Ibu Jujun. Dalam Tahun 2023, saya langsung saja ke 2023, itu kan ada anggarannya 94,6. Dari situ sebenarnya apa yang, yang, paling Ibu harapkan, sehingga inspektorat ini kerjanya tidak *as usual* ya, ada sesuatu yang spektakulerlah ke depannya. Karena kalau saya perhatikan inikan pekerjaan yang rutin ya, Bu,

sepertinya ya, pekerjaan yang rutin. *Nah*, kira-kira dari anggaran segitu itu menurut Ibu seperti apa? Kemudian problem apa yang Ibu temui di Tahun 2022, terkait dengan pengawasan mungkin juga penganggaran dan seterusnya.

Kemudian dari kebijakan, Pak, saya langsung melihatnya di tahun, di halaman 17 ya, Tahun 2023 kalau *nggak* salah, yaitu kegiatan prioritas nasional khususnya adalah sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan. Antara lain yang disampaikan di situ adalah analisis kebijakan pembentukan badan, *sorry*, yang antara lain adalah penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kereta api perkotaan. Saya mohon izin untuk dijelaskan perkotaan yang mana saja ini yang kira-kira dari analisa yang ingin digapai atau kebijakan yang akan ditelorkan di Tahun 2023, nanti.

Demikian juga pengembangan transportasi di kawasan terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan. Itu yang ingin digapai atau kira-kira harapan ke depan transportasi apa yang akan diimplementasikan di daerah-daerah tersebut.

Kemudian yang ketiga, dari BPSDM ya, BPSDM, Anggaran BPSDM inikan jumlahnya tidak banyak ya, Pak, ya tetapi kan menyangkut berbagai macam sumber daya manusia. Yang ingin saya sampaikan adalah pada halaman 4, terkait dengan BNPB Pak, Pak, itu saya melihat dari BNPB yang jumlah totalnya adalah 1,351 dan seterusnya ya 100, dari realisasinya itu capaian penerimaannya. Kira-kira menurut menurut, menurut Bapak ke depan itu saran-saran dalam rangka untuk peningkatan BNPB itu kayak apa, karena kita sangat membutuhkan ini tentunya termasuk BLU dalam rangka untuk supaya APBN ini tidak tergantung terus kepada utang. Dan, kita semua tahu bahwa memang sebagian dari kelembagaan kementerian ini antara lain adalah salah satu sumbernya adalah utang, baik utang luar negeri maupun utang kepada masyarakat.

Kemudian yang terakhir, Pak, Pak Sekjen ya. Halaman 11, Pak, saya melihatnya, target yang ada dari kronologis penyusunan RKA Tahun 2023, Pak, itu dari pembahasan Pagu di Tahun 2023 itu kan 1,353 triliun. Kemudian, Pagu indikatifnya adalah 541,15 miliar ini sesuatu yang sangat jauh, artinya separuh *nggak* ada begitu, dari Pagu yang ada. Lalu dari sudut *kualite* yang Bapak gapai, yang Bapak capai ini seperti apa, saya minta penjelasannya. Karena kalau dilihat dari sini tentu banyak hal yang diturunkan, banyak hal yang tidak bisa digapai di Tahun 2023. *Nah*, mohon penjelasan untuk hal tersebut dengan anggaran yang tidak ada 50% bahkan ini hanya 30%-an *gitu* ya, dari jumlah yang ada.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Sri Rahayu.

Selanjutnya Pak Djenri, singkat ya, Pak Djendri, ya.

F-P. DEMOKRAT (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.) :

Terima kasih atas kesempatan, Pak Ketua, dan seluruh peserta rapat RDP khususnya dari Departemen Kementerian Perhubungan ini.

Ada hal yang perlu saya sampaikan kemarin saya sama-sama Bapak Presiden meresmikan satu proyek di yang dibuat oleh Balai Sungai di sana. Tapi tiba-tiba ada jadwal yang berubah, Pak, langsung dari jadwalnya itu sudah ada yang, jadwal yang tidak terencana ke Likupang. Itu yang selalu saya bilang, Pak, dengan menteri kemarin. Di sana kan KSPN-kan salah satunya Sulawesi Utara, Likupang itu masuk ke KSPN ya, tapi kemarin yang saya bilang ternyata Tahun 2022 kita cuma dapat rehab pelabuhan kecil di Likupang itu. Saya perkirakan itu jadwal berubah karena Pak Gubernur kita itu mau lihat kondisi Likupang itu. Saya tidak tahu kalau dianggarkan lagi di 2023 ini, karena saya sudah pernah menyampaikan aspirasi ini, surat gubernur ini ke menteri langsung. Saya tidak tahu dimasukkan di mana aspirasi itu.

Dan, yang kedua, kemarin juga saya sudah bilang itu karena di sana rawan *tarkam* di wilayah Bolmong dan Kota Kotamobagu itu karena sering lampu di jalan itu padam, bukan padam tidak ada lampu, sehingga kalau terjadi *tarkam* awalnya dari situ. Orang lempar mobil, kampung sebelah yang kena mereka datang menyerang dan terus-terusan sudah beberapa tahun ini terjadi. Kami minta, Pak, di 2023 ini ada khusus perhatian untuk pemasangan lampu di jalan itu di Dumoga Raya, Bolmong Raya, Kota Kotamobagu.

Yang ketiga, Pak Ketua, terakhir, balai kan itu tempat kita berkoordinasi, bukan cuma semata-mata kepentingan aspirasi dari kita-kita Anggota Dewan khususnya saya. Saya sudah bilang ke menteri kemarin, sampai hari ini Kepala Balai Perhubungan Darat-nya di sana, saya *nggak* tahu ada atau *nggak* ada. Karena saya sudah sampaikan kemarin waktu kita RDP dengan menteri, tidak pernah ada koordinasi kepala balainya. Saya tahu mungkin baru, justru saya sering saling komunikasi dengan kepala balai, ternyata sudah pindah ke Jakarta, sehingga di teori pembinaan itu karena itu kewenangan Bapak, saya tidak akan membina kepala balai di sana. Kalau teori bilang kalau Bapak mau bina kemudian tidak berubah ya, saya tidak tahu apa selanjutnya dari kata bina itu.

Bapak sudah tahu kalau tidak bisa dibina dia mau diapakan *gitu*, sehingga saya usulkan saja kepada Bapak, ya bina dululah dia, tapi kalau *nggak* dibina tempat kita berkoordinasi di daerah, karena kita wakil dari daerah siapa lagi di sana untuk semua program kegiatan kerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan di daerah. Sampai hari ini, Pak, kan sebenarnya dia sudah tahu dari kemarin saya sudah bicara dengan menteri di RDP, tapi sampai hari ini saya tidak tahu posisinya di mana. Mudah-mudahan beliau mendengar saya bicara hari ini ya.

Mungkin itu terima kasih, Pak Ketua.
Terima kasih, Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Djenri.

Ini curhat ini Pak Sekjen, nanti Pak Djenri, Pak Sekjen akan sampaikan seluruh Kepala Balai di sana, supaya tidak perlu dibinasakan. Baik, mudah-mudahan Pak Djenri besok topiknya sudah beda, Pak. Sudah dua kali rapat kayaknya topiknya sama ini, kalau sampai tiga kali nanti nyanyi lagu Pance ini ya, jangan sampai tiga kali, nanti Pak Sekjen pasti sudah catat ya. Ya kalau koordinasi dengan DPRD, tapi itu bukan sesuatu yang sulit seharusnya.

Baik, berikutnya Pak Anwar Hafid, singkat ya, Pak, ya. Oke, yang mendayu-dayu tinggalkan saja, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Siap, terima kasih, Pimpinan.

Pak Sekjen, Pak Dirjen yang saya hormati,

Yang pertama, pada Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Jadi, banyak sekali rekomendasi ada 44 rekomendasi yang dihasilkan di Tahun 2022, saya hanya ingin mendengarkan penjelasan tapi tertulis saja, Pak, nanti. Yang pertama, soal program rekomendasi soal program subsidi dan keperintisan itu, Pak. Mungkin kita perlu tahu, Pak, isi rekomendasi itu. Yang kedua, soal penyesuaian harga tiket angkutan udara. Kita mau tahu, Pak, kira-kira sampai kapan ini kita akan memperoleh progres dari Kementerian Perhubungan, rakyat Indonesia ini bisa merasakan kembali harga tiket yang ideal. Kira-kira sampai beberapa tahun ke depan, Pak, sesuai dengan analisa kebijakan yang direkomendasikan.

Kemudian yang ketiga, yang saya lihat adalah dukungan transportasi udara untuk ekspor perikanan. Ini saya kira sangat penting, Pak, karena salah satu keunggulan bangsa kita ini adalah sektor perikanan. Kita juga mau lihat rekomendasi Bapak ini, apa-apa saja terkait dengan dukungan transportasi udara untuk sektor perikanan. Itu yang pertama ke saya sampaikan, mungkin saran saya dari 44 rekomendasi kebijakan ini bisa kita diberikan kepada seluruh Anggota, sehingga kami bisa melihat dan terus mengawal apa yang Bapak sudah merekomendasikan, karena ini saya kira sangat penting apa yang sudah dihasilkan dari 44 rekomendasi kebijakan. Mudah-mudahan dengan rekomendasi ini *insya Allah* akan memperbaiki kinerja Kementerian Perhubungan di masa yang akan datang.

Yang kedua, ini titipan saja ini kepada, melalui Pak Sekjen, Pak, titipan kepada Dirjen Perhubungan Udara, karena kemarin tidak sempat hadir. Saya titip Pak Dirjen itu Bandara Morowali itu adalah bandara yang sangat ramai, Pak, sekarang, di banding dengan tempat lain justru penerbangan yang kurang, kalau di sana malah tidak bisa menampung, Pak. *Nah*, saran saya tolong menjadi prioritas karena itu bagian dari kawasan industri yang sudah memang menjadi salah satu hal prioritas nasional. Jangan dicicil-cicil, Pak, kalau bisa

tahun ini saya lihat ada anggaran di bagian pelatarannya, mungkin sekalian yang paling mendesak itu adalah landasannya, Pak, *runway* itu yang paling mendesak supaya diperpanjang sehingga kapasitas pesawat yang masuk bisa lebih besar. Sehingga tidak seperti hari ini kita sampai seminggu, dua minggu antri tiket baru bisa kita dapat dengan sampai, 3 sampai 4 kali *flight* setiap hari. Saya kira ini penting menjadi perhatian utama dari Kementerian Perhubungan, Pak. Cuma itu saja, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tenang saja, Pak Anwar Hafid, karena nanti kita dengan Dirjen Udara juga ada, Pak, nanti Bapak nyanyikan lagi lagu yang sama biar nanti diterima, Pak.

Baik, selanjutnya Pak Anwar Hafid, berikutnya, Pak Fauzi.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatulalhi wabarakatuh,
Selamat sore.

**Yang saya hormati Pak Ketua,
Pak Wakil Ketua,
Teman-teman Komisi V, dan
Bapak Sekjen, dan Irjen,
kemudian Bapak-Bapak yang lainnya,**

Ada beberapa hal, Pak, yang ingin saya minta sedikit pendalaman, Pak, ya, tapi saya singkat-singkat saja karena diminta oleh Pak Ketua tadi. Yang pertama, Pak, di halaman 10, Pak, ya. Di sini ada Mahkamah Pelayaran ya, Pak, ya anggarannya sekitar 18 itu, Pak, ya. *Nah*, saya ingin tanyakan karena Bapak yang memahami lebih teknishlah, apakah anggaran sebesar ini bisa mencukupi, Pak. Mengingat khususnya di daerah Indonesia bagian timur itu, Pak, banyak sekali kapal yang terbalik dikarenakan perubahan status tanpa izin *gitu*, Pak. Misalkan kapal barang menjadi, kapal orang menjadi barang, *kok* bisa, bisa apa? Bisa berlayar *gitu*, Pak.

Nah, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, Pak, apakah mencukupi atau tidak *gitu*. Kemudian ini ada *nggak cost sharing* biaya untuk penanganan musibah misalkan, karena kadang-kadang pencarian orang ataupun apa pun *gitu*, Pak, ya kadang-kadang sudah waktunya pendek sudah selesai *gitu*, adakah *cosh sharing* dari Kementerian Perhubungan ini. Itu untuk Sekjen.

Kemudian, untuk apa Badan Kebijakan Transportasi, Pak. Saya sering sekali, Pak, bicara tentang mungkin buat Sekjen juga tentang Munte gitu, Pak, ya tetapi sayangnya 2023 peluang itu ada tapi tetap Munte tidak, tidak dapat, Pak. Padahal Munte ini kalau bicara strategi, Pak, ini sangat strategis apalagi di apa, di Luwu Raya begitu, Pak, ya Luwu Raya terdiri dari 4 kabupaten itu berapa kali jembatan putus, Pak. *Nah*, putus ini panjangnya minta ampun, Pak, apa ngantrinya, Pak, sehingga bahan baku langsung naik.

Nah, kalau Munte ini difungsikan, dimaksimalkan *gitu*, Pak, sekarang dia sudah beroperasi, Pak, tapi sangat tidak maksimal. Kalau ini dimaksimalkan mungkin alternatifnya bisa ke sana, Pak, lewat pelabuhan, Pak, terutama untuk memenuhi Luwu Utara dan Luwu Timur, Pak, *gitu*. Karena banyak putus kebanyakan di daerah-daerah Palopo negitu. *Nah*, ini saya meminta kalau bisa di 2024 ini Pelabuhan Munte ini menjadi, ya kebijakan strategislah, Pak, *gitu*.

Kemudian saya ingin tahu, Pak, sebenarnya apa *sih* masalah perhubungan yang paling mendasar, Pak, dari temuan-temuan Bapak ini, Pak. Yang ketiga, saya juga ingin mengetahui, Pak, mungkin nanti bisa tertulis, Pak, ya, pendapat Bapak ataupun di tempat Bapak ya, terhadap rencana DKI ini untuk berbayar jalan, Pak, *gitu*. Saya ingin pendapat dari Bapak ini.

Kemudian untuk Sumber Daya Manusia, Bapak di sini dijelaskan ada kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, Pak. Tapi setahu saya sampai saat ini, Pak, ke depan ini kalau bisa hasil kerja sama itu, Pak, mungkin bisa kami diberikan masukan-masukan, Pak sedikit. Jadi, kita nanti bisa melihat kan mana yang bisa terakomodir atas usulan perguruan tinggi itu mana yang tidak *gitu*, Pak. Kita bisa diskusikan tempat ini *gitu*, Pak, sehingga kita pun bisa menambah paling tidak wawasan kita tentang bagaimana menyelesaikan perhubungan ini.

Berikutnya di pemaparan Bapak juga Taruna 2023 ada 13.813 yang lulus, Pak, ya *gitu*. *Nah*, saya ingin mengetahui, Pak, *output*-nya itu seperti apa, Pak, *gitu*, terhadap mereka-mereka ini *gitu* Pak. Apa ada penampungan, bukan penampungan, apa penyaluran atau tidak, kalau *nggak* kan akan menjadi sia-sia juga ini, Pak. Kemudian juga Anggaran 2023 466,7 miliar, di sini Bapak hanya menjelaskan soal anggaran dan alokasinya, tapi *output* strategis dan proses pembangunannya masih belum ada, Pak.

Yang terakhir, untuk Pak, untuk Ibu yang mewakili Irjen ya. Sama tadi dengan Ibu Sri, saya ingin mengetahui, Bu, apa kira-kira ada metode baru, Bu, dalam hal pencegahan dan pengawasan yang akan Ibu lakukan.

Yang terakhir, ini mungkin untuk Pak Sekjen dan untuk semuanya, Pak. Saya mengusulkan, Pak, tadi juga disampaikan oleh rekan saya, Pak. Kadang-kadang, Pak, apa yang kita sepakati di sini, Pak, itu di bawah tidak tahu, Pak, *gitu*. Karena itu saran saya, Pak, tolonglah baik Bapak maupun Irjen apa pun yang kita sudah sepakati di apa diturunkan ke bawah, Pak. Sehingga pada saat kita koordinasi mudah, *gitu*, ini bahkan sama sekali *nggak* tahu *gitu*. Tolonglah ini disampaikan kepada jaringan Bapak ke apa, ke bawah. Saya pikir itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Fauzi. Selanjutnya Pak Eddy Santana.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V, Pak Sekjen, Irjen atau yang mewakili, BPSDM, dan BKT,

Saya tertarik, beserta jajaran khususnya ya, saya tertarik dengan BKT, Pak, jadi Badan Kebijakan Transportasi. *Nah*, di sinilah awal mulanya ada perencanaan terintegrasi *gitu* kan. Ini sudah saya lihat begini, di sinilah dapurnya Kementerian Perhubungan itu di-BKT. *Nah*, ingin saya sampaikan bahwa pernah atau sering dilakukan *webinar* dan FGD (*Focus Group Discussion*), tapi sayangnya kita *ndak* tahu *gitu*. Coba sekali-sekali undang kami *gitu* dan saya khususnya tertarik, Pak, transportasi perkotaan ya mungkin kita bisa menyerap dapat ilmu dan juga bisa berbagi *gitu*, pengalaman “*oh*, ini *loh* yang bagus seperti ini”. *Nah*, ini, Pak, jadi mohon ke depan kami diundang, Pak, untuk hal seperti ini.

Yang kedua, khusus Dapil, Pak, sekali lagi ini sudah sering saya sampaikan, Pak, tapi ini sepertinya pas, Pak, ke BKT saya sampaikan. Transportasi perkotaan Palembang itu ya, mengenai *konektifitas* moda transportasi. Saya juga ikut mendorong Pak, terakhirnya, mendorong LRT itu supaya dipakai, supaya jadi maksimal pemanfaatannya LRT Palembang. Dan, sekarang sudah terlihat *gitu* ya, ada *feeder*-nya, ada bus yang sistemnya *by the service gitu* ya, *nah* ini sudah, sudah jalan.

Dan ada lagi fitur angkot, *new* angkot itu, dan angkotnya konon pakai ac lagi, ini luar biasa. Hanya sayangnya LRT ini cuma sampai stasiun ujungnya Jakabaring, dari airport ke Jakabaring. Padahal di situ banyak sekali tempat apa, pemberhentian terminal yang bisa dimanfaatkan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang jumlah 20.000 lebih. Tapi mereka bingung, Pak, kalau cuma sampai Jakabaring mau naik apa lagi *gitu* dan akhirnya pasti *nggak* pakai itu. *Nah*, ada baiknya ke depan *gitu* ya, di stasiun ujung dari LRT ini, itu disambut dengan bus, *shuttle* bus hanya lewat tol Palembang sudah layak, jadi Palembang-Unsri, Unsri-Palembang. Dan, itu jaraknya atau pun waktunya relative singkat itu, saya yakin meledak pemakaian itu, pemanfaatan LRT ini. Ada rencana saya juga, saya sampaikan dengan Pak Menteri, bahwa kita harus, harus apa, sosialisasi *gitu* ya dengan mahasiswa. Kita ajak mahasiswa tapi kalau sudah ada itu, Pak, satu, dua lumayanlah, dulu Damri, tapi *nggak*

nyambung juga Damri, Pak, bukan langsung di sana *gitu*, di stasiun ujung, *nah* ini.

Kemudian yang tiga yang terakhir, ini mohon tertulis saja, Pak, rencana dan realisasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dan ini jadi pembicaraan banyak publik. Saya lihat di Youtube, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya tertarik dan agak jelas kenapa seperti itu *gitu* ya, kenapa kereta api cepat ini evaluasinya walaupun ini, ini kan ini yang lama, Pak, perusahaan periode yang lalu, tapi kalau di perhubungan orangnya ini-ini juga, Pak, belum ada yang belum pensiun *gitu* kan. *Nah*, bagaimana studinya itu, *nah* sampai di mana, apakah cuma sampai Padalarang stop, kalau sampai Surabaya kapan itu, kalau mau sampai Surabaya, dan kalau sampai Surabaya pasti dipakai. Kalau Jakarta-Padalarang saya 100% yakin itu tidak dimanfaatkan orang, karena masih ada moda transportasi yang lain, kereta api yang lama yang dua, tiga jam, dan juga ya mobil sendiri lebih nyaman. Masa kita stop di Padalarang harus cari lagi taksi *gitu* ke Bandung. *Nah*, ini sangat tidak *logic* bagi saya. Saya kira ini, Pak, mohon ini rencananya saya mohon tertulis, *gimana* dan kapan *gitu* realisasinya sampai Surabaya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Eddy Santana.
Pak Willem, singkat, Pak, ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Kami tentu memberikan apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran 2022 dan semoga Realisasi Anggaran untuk 2023 lebih ditingkatkan lagi. Kami coba memberikan catatan sedikit kepada Badan Kebijakan Transportasi terkait dengan terjadinya *incident* pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan membawa korban jiwa pada hari Minggu, tanggal 18 2022, Desember lalu. Bagaimana dengan tugas dan fungsi BKT terkait dengan rekomendasi tidak lanjut atas kebijakan dan terjadinya *incident* tersebut, apakah tetap lanjut atau dihentikan, saya sudah melakukan kajian.

Dan, yang berikut BPSDM, di Papua itu ada berapa akademi tapi statusnya belum ditingkatkan, masih akademi politeknik belum ditingkatkan menjadi akademi penerbangan. Butuh perjuangan yang panjang hingga hari ini belum, kiranya ini menjadi perhatian karena di Papua hari ini transportasi udara merupakan urat nadinya masyarakat di Papua. Hingga hari ini transportasi utama yang menjadi, yang menjadi prioritas hari ini, karena transportasi lain baik darat maupun laut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena masyarakat lebih besar itu lebih banyak ada di daratan besar, di Pulau Besar. Dan, kebanyakan mobilisasi masyarakat dari dan ke tempat tujuan kebanyakan

menggunakan transportasi udara hingga hari ini. Dan, walaupun sampai hari ini masih terbatas, tapi lebih banyak menggunakan transportasi udara. Oleh karena itu, kehadiran akademi politeknik di Jayapura dan juga Timika mohon jadi perhatian, semoga ke depan statusnya dapat ditingkatkan.

Dan, juga perlu perhatian terkait dengan hingga hari ini tingkat kemahalan harga tiket pesawat, baik di Papua maupun ke luar Papua itu luar biasa sampai mencekik masyarakat Papua, karena kami saja terus terang untuk uang reses itu tidak pulang pergi saja sudah puluhan juta, PP sudah habis 50 juta transportasi apalagi masyarakat. Dan, seringkali kami suarakan ini tapi kelihatannya sampai sejauh ini Menteri Perhubungan dan jajaran pun tidak mampu mengambil kebijakan mempengaruhi tingginya tingkat kemahalan pesawat ke kami di wilayah timur. Apakah ini dimainkan oleh maskapai penerbangan atau calo, ini belum, sampai hari ini kami belum bisa pastikan. Oleh karena itu, kami harapkan dari Kementerian Perhubungan melalui dirjen terkait, bisa menjadi perhatian untuk menekan tingkat kemahalan harga tiket pesawat, baik di transportasi lokal maupun juga nasional.

KETUA RAPAT:

Sudah, Pak Willem?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Dan yang berikut untuk, ada sejumlah penerbangan saya tidak tahu apakah ini dari Kementerian Perhubungan atau dari pihak lain. Ada sejumlah penerbangan yang selama ini dilayani kawasan-kawasan terpencil itu tidak, tidak, izinnnya sudah tidak diperpanjang lagi seperti Susi Air, pesawat-pesawat kecil, penumpangnya hanya 5 penumpang kalau *nggak* 9, itu izinnnya sudah tidak diperpanjang lagi. Kalau bisa ini ditinjau kembali supaya diizinkan lagi untuk melayani pelayanan di rute penerbangan kawasan-kawasan terpencil di daerah Papua maupun di pulau-pulau.

Pada kesempatan ini yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Willem.
Bu Cen, silakan.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Sekjen dan jajaran dari Kementerian Perhubungan,**

Saya langsung saja kepada Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Saya melihat ini ada rincian profil kegiatan Badan Kebijakan Transportasi, saya ingin minta penjelasan mengenai analisis kebijakan implementasi *remote tower* di bandara wilayah 3T. Kebetulan daerah kami itu daerah 3T, jadi saya minta penjelasannya. Juga evaluasi penyelenggaraan keperintisan angkutan udara, itu evaluasinya mengenai subsidi atau apa, jadi tolong dijelaskan mungkin bisa tertulis nanti ya, disampaikan kepada Sekretariat.

Yang kedua, ini 21 kegiatan *tagging* Kemenhub. Apakah program ini setiap tahun ada atau bagaimana? Kalau ada jangan Anggota Dewan hanya diberikan catatan untuk evaluasi kebijakan, kalau ada tiap tahun berarti kami ingin mendapatkan hasil evaluasi tersebut. Contohnya evaluasi kebijakan penanganan perlintasan subbidang perkeretaapian, apakah ini program setiap tahun ada evaluasi. Jadi, kami ingin hasilnya juga, hasil evaluasi itu seperti apa. Itu untuk kebijakan transportasi ya.

Untuk Pak Sekjen, Pak Sekjen daerah kami ini kan geografisnya berbeda. Untuk angkutan udara itu sangat diperlukan, kalau tidak ada angkutan udara kami ini *nggak* tahu mau menyeberang pakai apa, kalau pakai kapal laut itu agak memakan waktu. Jadi, tolong tiket pesawat itu harus jadi prioritas, karena setiap ke daerah, saya mendapat keluhan tiket pesawat luar biasa mahal. Tidak ada dibidang itu *season* apa, setiap kali berangkat luar biasa mahal, tolong jadi prioritas. Itu saja terima kasih.

Pimpinan, terima kasih, saya menyampaikan sesuatu kepada Pak Sekjen juga.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu, kalau ada sekalian musangkingnya juga boleh.

Kalau Bu Cen, ini *ndak* berani kalau kita *nggak* kasih kesempatan, nanti putus kita musangking *nggak* dapat kita. Silakan yang lain juga kalau ada sekalian. Pak Willem ada yang mau diserahkan, Pak Willem? Oh, baru dikasih, *oke*. Tenang saja, Pak, nanti dengan direktorat jenderal teknis masih ada kita RDP nanti.

Ya, Pak Harvey Malaihollo. Oke, baik, ya silakan Pak Eddy, *nah*, Pak Eddy Santana. Silakan, Pak, ya, memperkuat sumber daya manusia di Sumatera Selatan.

Baik, masih ada? Oh, Mas Dewo ya, kirain Mas Dewo tadi mau jadi Bapak yang manis sore ini. Silakan, ada yang mau diserahkan juga Mas Dewo? Jadi kalau sudah menyerahkan lumayan potong 5 menit.

Silakan, Mas Dewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, tidak ada sesuatu yang ingin saya serahkan. Tapi saya mencermati betul pada saat kawan-kawan menyerahkan tadi, kelihatannya Pak Sekjen yang melihat wajah yang menyerahkan serius itu adalah pada saat Bu Cen menyerahkan, kalau yang lain kayaknya *nggak* begitu diperhatikan itu. Itu kan mudah ditafsirkan kan, baik ini bercandaan saja supaya *nggak* ngantuk.

Terima kasih, Pimpinan. Pertama, kepada BKT (Badan Kajian Transportasi), Badan Kebijakan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi, artinya mengkaji atau *nggak* itu, Pak? apa?

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE):

Merumuskan kebijakan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Ya, terima kasih.

Saya apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan yang membuat lembaga baru ini, Badan Kebijakan Transportasi. Ini merupakan satu langkah maju bagi satu institusi kementerian. Jadi, kalau andaikata setiap *output* atau *outcome* dari kementerian itu dilakukan satu badan kebijakan ya, Badan Kebijakan Transportasi, sebenarnya masih susah untuk ditafsirkan terminologi dari lembaga ini ya. Badan Kebijakan Transportasi itu merumuskan satu kebijakan ya, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Jadi, kebijakan-kebijakan yang sekarang ini sudah berjalan dijadikan pedoman untuk melakukan satu kegiatan di Kementerian Perhubungan, itu artinya perlu juga untuk dilakukan evaluasi, perlu juga untuk dilakukan kajian, kan begitu maksudnya ya. Itulah yang saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, karena tidak ada satu kebijakan yang sudah berjalan itu, itu pasti sempurna, pasti semuanya baik, pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Jadi, di situlah perlu dilakukan satu evaluasi apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak.

Dan, andaikata kementerian-kementerian yang lain atau lembaga yang lain itu membuat model yang semacam ini seperti di Kementerian Perhubungan saya yakin kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk berikutnya itu akan lebih baik, akan lebih sempurna begitulah meskipun sempurna yang 100% itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi tidak mungkin itu tanpa ada satu evaluasi. Ibaratnya seperti yang dikatakan Ketua Umum Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, jangan sampai kita berjalan itu seperti barisan bebek ya, satu ke sana sana semua meskipun itu belum tentu benar.

Jadi, ada kalanya memang di antara dari barisan itu mengingatkan supaya kita melakukan satu evaluasi. Jadi, saya sangat mendukung kebijakan Menteri Perhubungan untuk melakukan kebijakan, evaluasi kebijakan. Tetapi

apakah evaluasi kebijakan itu kebijakan yang diambil oleh internal Kementerian Perhubungan sendiri ataukah kebijakan dari lembaga atau kementerian yang lain tapi terkait terhadap tupoksinya Kementerian Perhubungan. Misalnya kebijakan dari Kementerian Industri, ya yang terkait dengan apa itu, pabrikasi kendaraan dan lain sebagainya. Misalnya juga kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang terkait dengan pajak penumpang perkeretaapian atau kereta api itu sendiri yang terkait juga dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian yang lain tetapi itu berdampak terhadap pelayanan transportasi di Kementerian Perhubungan.

Sesuatu yang ideal ingin diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi laut, maupun udara, tapi terkendala oleh kebijakan-kebijakan lain. Apakah ini juga merupakan ruang lingkup dari BKT untuk dilakukan kajian atau tidak. Kemudian, BKT perlu memprioritaskan kajian transportasi terhadap hal tertentu, terhadap sektor tertentu utamanya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di antaranya masalah aspek keselamatan, masalah aspek bentuk pelayanannya, masalah aspek, apa itu, beban sosial perekonomian masyarakat misalnya yang dikeluhkan oleh tiket pesawat yang sangat tinggi.

Karena tidak mungkin semua kebijakan itu dilihat atau dievaluasi oleh BKT. Tetapi yang saya sayangkan atau mungkin saya salah dengar, BKT tadi menyampaikan bahwa hasil kerja BKT hanya berupa rekomendasi, tapi tidak masuk dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau memang hanya rekomendasi tidak masuk dalam proses pengambilan kebijakan, apakah ini nanti akan efektif hasil kerja BKT, ya. Kalau hanya rekomendasi-rekomendasi itu saya kira hanya menumpuk kertas di tiap tahunnya. Tetapi kalau ini bisa menjadi sesuatu yang mengikat, dalam arti terlibat dalam proses pengambilan kebijakan berarti produk BKT ini bisa berguna terhadap Kementerian Perhubungan, jadi evaluasinya pun menjadi efektif. Maka saya memberikan saran atau masukan mungkin melalui Sekjen, supaya hal ini ditinjau kembali. Kalau bisa jangan hanya berupa rekomendasi tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Persoalan apakah itu didengar atau tidak, tapi kalau dilibatkan itu berarti secara langsung bisa memberikan masukan, tapi kalau hanya rekomendasi itu biasanya sesuatu yang terpisahkan.

Kemudian yang kedua, kepada BPSDM, BPSDM ini anggarannya cukup besar 3 koma sekian triliun, tetapi beban BPSDM itu juga tidak sedikit terhadap 17 atau berapa politeknik seluruh Indonesia itu tadi ya, yang menyebar sampai ke Merauke juga, kepada sampai Jayapura juga. Saya hanya ingin mendapatkan satu penjelasan kepada BPSDM, anggaran sebesar 3,3 triliun itu sebenarnya sudah cukup ideal atau tidak untuk membentuk taruna-taruna yang berkualitas, yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki daya saing tingkat internasional, daya saing global, tidak hanya untuk terpenuhinya kekurangan atau kebutuhan di Kementerian Perhubungan secara kuantitas. Tetapi, secara kualitas yang pada akhirnya Kementerian Perhubungan itu punya daya saing, di perhitungkan secara internasional atau tidak dengan angka segini ya. Jadi, bisa dilihat dari konteks kualitas dan juga bisa dilihat dari konteks kuantitas. Secara kuantitas apakah Taruna itu sudah

memenuhi jumlah yang dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan, baik di darat, laut, udara, maupun yang lainnya, maupun perkeretaapian atau belum. Dari sisi kualitas apakah dengan anggaran sekian bisa menciptakan taruna yang nantinya dipakai oleh Kementerian Perhubungan bisa betul-betul meningkatkan kinerja sehingga Kementerian Perhubungan ini betul-betul memiliki daya saing secara global atau tidak, ya.

Ini memang BPSDM, saya berharap punya pemetaan sampai sejauh itu ya, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana sarana prasarana utamanya, bagaimana fasilitas penunjangnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana proses pengajarannya, bagaimana mentor dan semua di situ itu. Coba kira-kira dengan anggaran segitu, karena ini merupakan pilar daripada kinerja Kementerian Perhubungan ya dari taruna-taruna ini. Jadi, kalau penggodokannya, proses pengolahannya di situ tidak baik oleh karena anggaran, saya kira juga tidak begitu efektif. Jadi, kalau melihat dari proses rekrutmen para Calon Taruna itu saya sangat yakin bahwa semua yang menjadi Taruna di sana adalah siswa-siswa yang unggul, karena seleksinya *fair* itu tesnya pakai CAT tidak bisa dimain-mainkan. Kalau sudah dijamin bahwa siswa di sana itu pintar, berarti kan tinggal bagaimana proses pengolahan asah, asihnya itu di situ. Makanya saya pertanyakan kepada BPSDM, apakah anggaran sekian itu sudah ideal atautakah belum, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.

Kepada Irjen, Irjen ini tadi disampaikan kepada kami bahwa yang diawasi sekian orang begitu ya, berapa jumlahnya tadi 500.000 atau beberapa begitu ya. Kemudian yang diawasi 33 triliun sesuai dengan anggaran Kementerian Perhubungan. Bagaimana dengan anggaran yang itu bersumber dari lain tidak dari APBN, ya, bagaimana yang program-program yang berjalan karena KPBU, seperti juga kereta cepat Jakarta-Bandung yang sampai 100 triliun lebih. Itu apakah juga tidak masuk ruang lingkup yang diawasi oleh Irjen ya, mengapa yang disebutkan hanya sekian.

Jadi, Irjen, saya kira segala sesuatu yang terkait dengan kerja Kementerian Perhubungan menurut hemat saya itu adalah ruang lingkup Irjen. Jadi, Irjen jangan sampai prestasi itu diukur oleh karena banyaknya masalah yang di atasi, kalau bisa persoalan itu sedikit itu adalah kinerja yang bagus, parameter yang bagus daripada Irjen. Irjen juga harus punya semboyan, orang-orang di Kementerian Perhubungan untuk urusan internal, Irjen siap meledak-ledak marahnya tapi kalau di luar harus dilindungi, itu prinsip ya kan, prinsip bagi Irjen. Saya hanya memberikan masukan saja, saya *nggak* tahu persis bagaimana kerjanya, tapi kalau dilihat dari anggaran 96,6 miliar di Tahun 2023, ya itu mesti usulan yang anggaran yang sudah diusulkan dan dirancang sendiri oleh Irjen. Jadi konsistensinya dalam implementasinya saya kira itu sudah disiapkan oleh Irjen.

Kemudian yang terakhir kepada Sekjen, Sekjen ini saya tidak melihat dari sisi anggarannya. Anggaran Sekjen tentu saja jauh jika dibandingkan dengan direktorat jenderal-direktorat jenderal, jauh jika dibandingkan dengan BPSDM, tapi kewenangannya Sekjen itu jauh lebih besar daripada yang lain. Sekjen punya posisi yang sangat strategis, kalau Kepala BKT tadi mengatakan

ini sebagai orkestranya dengan rekomendasi kebijakan-kebijakan sebagai orkestranya, ya orkestra dalam konteks kebijakan, tetapi dalam konteks kinerja orkestra itu ada di Sekjen. Bagaimana di situ ada biro-biro, di situ ada kepala pusat-kepala pusat, dan yang lain yang merupakan kepanjangan tangan ke direktorat jenderal-direktorat jenderal kepada BPSDM semua ada di Sekjen. Jadi, dengan anggaran yang dimiliki oleh Sekjen ya itu merupakan satu tantangan bagaimana memastikan bahwa kerja di tiap Direktorat Jenderal itu bisa berjalan. Baik dalam tahapan pelelangan, baik tahapan pelaksanaan konstruksinya, baik monitoring dan evaluasinya, sampai pada *outcome*-nya pelayanan transportasi kepada masyarakat itu pun juga tidak lepas dari kinerja Sekjen karena di situ juga ada biro-biro yang tadi disebutkan, ada biro hukum, dan sebagainya.

Jadi saya berharap kepada Sekjen ya, antara Dirjen, Setdirjen, Direktur, Subdirektur, Kepala Balai, sampai PPK, ini merupakan satu hirarki dalam struktur organisasi di Kementerian Perhubungan, yang satu dengan atasannya harus taat jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Kepala Balai dengan BPK tidak satu bahasa, Balai dengan atasan itu tidak satu, tidak satu komando jalan sendiri-sendiri, ini juga harus dalam kontrol Sekjen. Jangan sampai direktur satu dengan direktur yang lain, direktur tidak ada kepatuhan dengan dirjen, kalau balai ditanya itu menunggu arahan, dan segala macam, dan seterusnya.

Tetapi, memastikan bagaimana hierarki atau struktur dalam organisasi Kementerian PU ini bisa berjalan, itu di tangan Sekjen tidak di tangan Pak Menteri. Pak Menteri itu adalah kebijakan secara politis, tapi memastikan satu orkestra dalam semua hierarki dan semua fungsional yang ada di Kementerian Perhubungan itu adalah Sekjen. Jadi, saya berharap dengan ini ya, Balai juga taat kepada direktur, direktur kepada setdirjen, kepada dirjen, dan seterusnya. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mas Dewo. Cukuplah sudah digarap semua sama Pak Dewo, Mas Dewo ini. Baik, dari meja Pimpinan, silakan, Pak Ridwan. Ya, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mungkin sama Pak Sekjen saja, beberapa hari yang lalu pada saat keberangkatan libur mungkin teman-teman Anggota DPR ataupun pulang setelah libur, itu banyak yang menelpon saya tentang protokol yang di bandara itu tidak bisa melayani teman-teman kita yang berangkat maupun yang pergi, terutama menjemput misalnya di muka pesawat *gitu*, misalnya di pintu pesawat ya garbarata. Barangkali perlu di anu perlu di perhatian, apa perhatian Pak Sekjen menyampaikan kepada Angkasa Pura, ya kalau bisa diberikanlah kesempatan karena tentu mereka juga butuh pelayanan yang apa namanya,

yang layak dan pantas. Dan, buat apa kita sudah melahirkan protokol DPR yang ada di sana, tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Kira-kira itu saja saya, Pak Ketua.

Pak Sekjen, terima kasih, Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Saya menambahkan sedikit saja, Pak Sekjen, terkait protokol ini. Barangkali *gini*, Pak Sekjen, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya, dibuat standar yang sama saja *gitu loh* berdasarkan ketentuan perundang undangan, ini DPR ini masuk katagori pejabat apa *gitu* kan. *Nah*, jadi saya rasa supaya, karena kebetulan, Pak Sekjen, kalau saya ini orangnya ya merakyat, saya jaranglah mau merepotkan sana-sini ya, baik di daerah maupun di Jakarta sini. Sedapat mungkin kalau *nggak* buru-buru *nggak* pernah pakai protokol, bahkan protokol DPR pun saya jarang hampir banyak tidak kenal saya, Pak, karena saya seringkali perginya ikut arus sajalah. Tapi justru di situ saya bisa melihat, Pak, *gitu loh*, bisa melihat ada perlakuan yang tidak sama untuk hal yang sama.

Nah, ini menurut saya harus diperbaiki oleh Angkasa Pura ya, lewat Pak Sekjen, supaya nanti jangan sampai ada perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama. *Nah*, ini bisa menimbulkan, padahal kita ini mitra, Pak, apalagi Komisi V misalnya. Kita ini kan ya, mohon maaf kinerja kementerian itu sangat ditentukan juga Pak, dari, bagaimana kita berproses sebagai mitra di ruangan ini. Tapi ketika kita berada di sana *kok* kita malah mendapat perlakuan *kok* tidak semanis yang lain misalnya begitu, ini yang tadi Pak Ridwan sampaikan.

Ini kita berharap jangan sampai terhadap hal yang sama berlaku standar yang berbeda bahkan terhadap teman-teman Komisi V misalnya *gitu*. Jadi, kita merasakan, tapi saya bisa melihat, Pak, ada orang yang bisa dijemput sampai ke, oleh ajudannya, protokolnya sampai ke kepala garbarata, saya sering nemukan itu. Tapi tadi Pak Ridwan menyampaikan rupanya protokol DPR *ndak* bisa seperti itu. Jadi Pak Sekjen, saya rasa itu saja barangkali kalau yang lain-lain semua sudah diulas oleh teman-teman kita pada pendalaman yang tadi.

Selanjutnya saya persilakan Pak Sekjen, untuk menjawab hal-hal yang dipandang perlu untuk dijawab oleh Pak Sekjen ya. Yang sifatnya sangat teknis nanti dijawab tertulis saja, Pak, ya.

Terima kasih, saya persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARJO, MSEA.):

Terima kasih, Bapak Ketua.

Yang kami hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota,

Jadi, saya akan menjawab hal yang praktikal dulu yang barusan disampaikan oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Tentang protokoler kami akan standarkan, Pak, dan kita akan buat surat edaran ke operator supaya mereka bisa melaksanakan suatu standar yang sesuai dengan peraturan keamanan dan keselamatan. Kami akan mengingatkan lagi, Pak, ini sebetulnya juga *nggak* boleh, Pak, sampai ke sana. Jadi, itu semua sesuai dengan aturannya ada titik-titik tertentu yang memang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, kecuali pilot, kru, ataupun orang petugas-petugas yang memang bertugas di situ. Kami akan standarkan, Pak, terima kasih atas masukannya.

Kemudian, tadi Bapak-Ibu Anggota, banyak yang menanyakan, apakah dengan anggaran yang ada itu mencukupi atau tidak? Kami akan jawab secara umum, Pak, secara khusus sudah kami catat nanti akan kami jawab tertulis. Intinya kami menerapkan skala prioritas, Pak, kalau memang anggaran yang kita ajukan katakanlah 100 hanya tersedia 50, otomatis mau tidak mau prioritas yang di bawah tentu saja akan kita lakukan eliminasi ataupun kita *suspend*, kita laksanakan ke tahun berikutnya. Prinsip-prinsip itu kita pegang, Bapak.

Kemudian, untuk beberapa masukan yang terkait dengan kereta cepat dan lain sebagainya nanti dari BKT, Pak, akan bisa menjelaskan. Tapi intinya memang bahwa program pemerintah ini tidak satu step, Pak, tapi akan berkelanjutan. Artinya bahwa kereta cepat itu tidak masuk akal kalau hanya sampai di sekitar Bandung, tetapi tentu saja akan diperpanjang sampai ke yang lebih jauh lagi, yaitu mungkin sampai ke Surabaya. Karena kalau kita lihat rasio penduduk kita di Pulau Jawa ini kan 150 juta lebih, Pak.

Kereta cepat ini ke depan akan bersaing dengan pesawat dan tentu saja akan *worthed* ke depannya, ya itu menjadi program besar kita yang kita harapkan tidak hanya mercusuar tetapi akan memberikan manfaat yang maksimal kepada Indonesia, pada saatnya nanti Indonesia pada taraf yang lebih baik lagi, tidak seperti sekarang. Mungkin di Tahun 2030 itu akan tersambung dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Itu secara umum, Bapak.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sekjen.

Ya, kalau kereta cepat itu kan sekarang sudah jadi mode, Pak, sebenarnya seluruh dunia mengembangkan itu. Apalagi Indonesia yang penduduknya sangat besar, itu *demand*-nya pasti sangat tinggi. Hanya memang kita ini kan terbatas belum mampu membangun saja sebetulnya. Kita berharap yang ini bisa jadi cepat dioperasikan yang ke Bandung, sehingga masyarakat ini bisa tahu, bahwa perdebatan itu kan harus jawab dengan fakta, Pak. Nanti faktanya seperti apa, kalau sudah dimulai tentu kita berharap dari

Kementerian Perhubungan, desain, dan seterusnya ya, perencanaan, studi, untuk Jakarta-Surabaya itu wajib hukumnya harusnya, Pak. Karena ini kan sangat padat sekali pasti *demand*-nya sangat tinggi.

Nah, kalau ini kan kita tidak bicara APBN kita bicara investasi kan, *nah*, negara memberi tempat untuk mendorong itu supaya investasi di sektor ini berjalan, *gitu loh*. Ini saya rasa banyak yang maulah, Pak, kalau di sini. Kalau bisnis itu gitu, ketika permintaan besar, ya, kemungkinan *recovery* investasinya lebih cepat, ya pasti semua orang pada mau. Jadi, kita berharap prinsip kita dukung kan *gitu* ya, seluruh yang sudah berjalan ini kita berharap bisa berjalan dengan lancar.

Supaya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, mungkin dari langsung ke BKT dulu, Pak, terkait beberapa hal pertanyaan soal kereta cepat dan seterusnya tadi dari Mas Dewo juga dari Pak Eddy Santana tadi yang menyingung soal itu.

Saya persilakan, Pak Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE.):

Terima kasih, Pimpinan.

Izinkan kami menyampaikan pandangan-pandangan, mungkin ini bukan sebuah jawaban Bapak-Ibu sekalian. Karena seperti kami sampaikan tadi, BKT itu dapur, setuju, Pak Santana, Pak Eddy, bahwa kami itu melaksanakan tugas pokok membantu Pimpinan, dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan agenda *setting* yang menjadi agenda Kementerian Perhubungan. Agenda *setting* ini bersumber dari salah satunya Direktif Pimpinan, Menteri Perhubungan.

Dinamika yang berkembang seperti tadi ada pertanyaan, IRP bagaimana, itu sudah pasti kami akan respon dengan suatu pertemuan, pembahasan, dan seterusnya. Demikian juga termasuk, Pak Dewo tadi katakan apakah ini kebijakan yang dievaluasi itu termasuk kebijakan yang sudah diterapkan, tetapi tidak termasuk kebijakan yang terkait dengan kementerian lain, Bapak, itu hanya internal Kementerian Perhubungan.

Bahwa kebijakan perhubungan itu terkait dengan kebijakan lain pasti, contoh saja banyak hal, Ojol misalnya pasti berkaitan dengan yang lain. *Nah*, dalam konteks itu sebagaimana kami sampaikan dalam metodologi kerja BKT ini, BKT sebagai pemain orkestra kita mengundang seluruh *stakeholder* terkait berdasarkan isu yang atau agenda *setting* yang dibahas. Jadi, kalau kita melibatkan beririsan dengan kebijakan kementerian lain, maka kementerian lain itu kita undang. Itu sudah kita lakukan, Bapak.

Secara detail, izinkan kami sedikit, Pak, dari Ibu Sri Rahayu terima kasih, Ibu Sri, kaitan dengan perkotaan ini kami diberikan tugas oleh Pak Menteri

untuk mengawal kereta perkotaan ini berkaitan, khusus berkaitan dengan integrasi antar modanya, Bu, bukan berkaitan dengan *main infrastructure*-nya karena itu berkaitan dengan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami sifatnya pembantuan untuk membantu hal-hal yang tanda kutip belum di-*touch* oleh Direktorat Jenderal dan ini Direktif Bapak Menteri, terutama berkaitan dengan integrasi. Perkotaan ini salah satunya mengenai LRT fase 3, saya ulangi *East-West*, termasuk juga lanjutan daripada MRT Blok M, sampai Kota ini.

Kemudian berkaitan dengan,

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, izin, Pak Ketua, izin sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pak Gede, maksud saya pertanyaan saya adalah kira-kira *plan*-nya itu kota mana saja yang dibuat oleh Bapak itu, itu kan perkotaan mesti kan tidak semua kota kan, kan kota-kota khusus yang memang memungkinkan untuk itu.

Terima kasih.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE.):

Baik, Bu, kaitan dengan ini, ini kan.

KETUA RAPAT:

Pak, supaya nanti tidak tiktok ya, kalau Bapak kita tiktok ini kita *nggak* selesai nanti. Kan, Bapak sudah punya kajian, itu saja nanti ditampilkan dijawaban tertulis *gitu loh*, bahwa kita akan membangun kota ini, kota ini. Kalau sudah ada studinya, Bapak bilang saja sudah ada, kalau belum ya, bilang belum, selesai.

Ya, silakan, Pak, supaya *nggak* panjang.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE.):

Siap, kami akan sampaikan secara tertulis nanti, Bapak.

Berkaitan dengan Pak Anwar Hafid, terima kasih, Bapak, 44 kebijakan ini akan kami sampaikan *summary report*-nya, kalau istilah kami adalah berupa

policy note, Pak. *Policy note* itu lebih ringkas nanti inti-intinya seperti apa beberapa kebijakan strategis utamanya.

Dengan Pak Fauzi, berkaitan dengan masalah yang paling *urgent* atau mendasar salah satunya sebagaimana Pak Menteri sampaikan, kami juga sepakat dengan itu berkaitan dengan *financing*. *Financing* itu menjadi permasalahan kita lihat dari Pagu Kebutuhan kita itu selalu hampir 30% dari yang dibutuhkan itu bisa didanai oleh APBN, sehingga *financing* ini menjadi hal yang mendasar di samping juga isu keselamatan dan isu perkotaan. Oleh karenanyalah Kemenhub juga men-*deliver* yang disebut dengan *by the service* itu salah satu sebagai merespon terhadap permasalahan mendasar di perkotaan.

Kaitan dengan Pak Eddy Santana, terima kasih, Pak, kami siap mengundang Bapak-bapak yang berkenan nanti pada saat ada webinar maupun FGD sebagai narasumber dan memberikan arahan-arahan, karena kami melakukan banyak hal berkaitan dengan pembahasan kebijakan itu.

Kemudian Pak Willem, mengenai kecelakaan itu bukan menjadi tugas BKT, Bapak, itu kecelakaan kerja. Saya rasa Pak Menteri sudah menyampaikan ini.

Kemudian, Ibu Cen, berkaitan dengan program yang di-*tagging* khususnya mengenai, salah satunya mengenai *policy* perlintasan apakah setiap tahun ini perlu tidak? Ini sekali lagi kami sampaikan yang menjadi pembahasan itu yang menjadi permasalahan yang terkini, dan sudah itu dibahas tidak akan muncul lagi, Pak, itu diharapkan demikian.

Pak Sudewo, terima kasih, Bapak, banyak dorongan dan *support* kepada BKT. Semoga kami mampu melaksanakan amanah ini, Pak, bahwa BKT betul sebagai dapur. Kemudian beberapa KL lain memang ada sejenis, Pak, yang persis dengan kita adalah Badan Kebijakan Perdagangan dengan transportasi dengan perhubungan, yang lainnya macam-macam, ada badan strategis, ada badan, beranekaragam. Kami sudah melakukan *benchmark* kelima kementerian, itu yang persis dengan kita adalah Badan Kebijakan Perdagangan yang sama dengan Kemenhub.

Kemudian

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE):

Siap.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, *mumpung* ketemu saja ini ya, Pak Pasek, ya.

KETUA RAPAT:

Mas, boleh juga diajak ngopi.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Boleh diajak ngopi?

KETUA RAPAT:

Boleh, boleh.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Jadi tidak perlu berbicara di sini.

KETUA RAPAT:

Nggak perlu berbicara lagi.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Nanti empat mata saja.

KETUA RAPAT:

Empat mata saja.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Agar lebih enak.

KETUA RAPAT:

Nah, boleh.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya ini salut sama Pimpinan saya, saya ikutilah.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak, ingat *loh*, Pak, kalau Mas Dewo *ngajak* ngopi, Bapak *nggak* mau saya disalahkan *loh*, Pak, ya. Bapak diskusi banyak karena Mas Dewo ini pemikir di komisi ini, Pak.

Silakan, Pak.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE):

Terima kasih.

Yang menarik lagi dari saran Bapak, Pak Sudewo berkaitan bahwa BKT tidak hanya merumuskan rekomendasi kebijakan tapi juga diharapkan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sejatinya sudah, Bapak, jadi setiap rekomendasi kebijakan yang kami *deliver* ke Pak Menteri sebagaimana Tusi, itu berakhir di Pak Menteri, Pak Menteri men-*deliver* kepada sub sektor yang terkait. Contoh, kami menyampaikan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan, yang paling terkini kemarin berkaitan dengan apa PSO KRL. *Nah*, itu setelah itu disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian dirapimkan pasti kami terlibat, seluruh Eselon I terlibat dalam pengambilan keputusan itu.

Jadi, pada prinsipnya sudah demikian secara kami sampaikan dalam metodologi kerja juga siklusnya memang *policy life cycle* nya memang demikian, Pak, setelah di-*deliver*, ditetapkan, dimonitor evaluasi. Kemudian jika itu tidak *perform* kami lakukan revisi atau *review* untuk tahap berikutnya.

Demikian, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kemurahan lebih lanjut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya ke Pak Kepala BPSDM dulu. Silakan, penekanan terkait *output* tadi, Pak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. Ir. DJOKO SASONO, MS.C.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Khususnya *matur suwun* Ibu Sri Rahayu, Pak Fauzi, Pak Willem Wandik, maupun Pak Sudewo. Terkait dengan apa yang tadi sudah diingatkan oleh Ibu Sri Rahayu, kami berpegang pada peraturan perundang-undangan, Bu, sebagaimana Ibu Menteri Keuangan pernah menyatakan selama ini kita kerja siang malam tapi aset maupun usaha kita tidur. Untuk itulah dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan itu kita mengoptimalkan dan secara maksimal. Bahkan ada ruang-ruang yang dibuka untuk kami bisa lakukan untuk bisa meningkatkan pendapatan BLU maupun PNPB. Yang menariknya kalau dengan BLU kita harus bekerja dulu dapat *income* baru kita bisa belanja. Ini memang kadangkala menjadikan satu hal yang sangat menarik.

Antara lain kegiatan yang menarik yang juga kami lakukan adalah meningkatkan misalnya kita punya poliklinik utama yang selama ini melayani internal kita buka untuk juga melayani eksternal di samping pelayanan 24 jam. Bahkan, ada yang kita tingkatkan menjadi rumah sakit seperti di PP Makasum punya rumah sakit tipe D, sehingga dengan demikian kita juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini ruang-ruang yang terbuka. Bahkan ada juga katakanlah kita membuka juga kampung Inggris seperti yang dilakukan di Pare Kediri, ini juga laku juga, jadi kita membuka itu.

Kami sadar bahwa kami ini birokrat, selama ini hanya mengatur-ngatur setelah mendapat BLU kita bersama dengan para *interpreneur* yang bisa memberikan kepada kami *oversight* untuk kita bisa maksimal. Jadi, kami nanti juga akan terus berusaha ruang-ruang yang ada kita coba manfaatkan. Termasuk kita bersinergi di dalam antara BLU, Ibu, dengan demikian kita bisa memberikan, katakanlah penguatan-penguatan untuk itu. Hal yang lain kami ingin barangkali nanti juga dapat arahan dari Komisi V bahwa BLU ini hampir sama dengan BUMN hanya aset tidak dipisahkan, sehingga kami punya ruang-ruang untuk itu.

Selanjutnya kepada Pak Fauzi, terima kasih, Pak. Jadi *output* dari lulusan BPSDM Perhubungan itu tidak saja untuk mengisi di pemerintahan, Pak. Di pemerintahan ada dua katagori, satu untuk operator, yang kedua untuk penguatan lembaga pendidikan, untuk dosen, dan segala macam, yang lainnya adalah untui industri. *Nah*, untuk yang pemerintah ini juga ada pola pembibitan yang mana, yang lulusannya nanti akan bekerja di pemerintah.

Ada beberapa prodi yang selama ini susah sekali kita peroleh, yaitu penerbang, pelaut. Karena prodi-prodi ini adalah jurusan yang sangat diminati oleh industri sehingga apabila ditarik dengan katakanlah gaji sebagai PNS itu sangat susah, akhirnya kita buka beasiswa poli (suara kurang jelas) ini agar supaya bekerja di pemerintahan. Sedangkan yang industri kita punya berbagai katagori yang memungkinkan untuk bisa diserap oleh industri. Memang tantangannya adalah kalau di kapal-kapal internasional atau pelaut segala macam ini kita punya negara tetangga yang mempunyai pemilik instansi yang tinggi juga.

Kemudian terkait dengan Pak Willem Wandik, Pak, kami terima kasih selalu Pak Willem mengingatkan, bahwa Politeknik Penerbangan Jayapura ini adalah perguruan tinggi, Pak. Jadi, kita sudah bisa membuka program D1 sampai S3, sekiranya ini memungkinkan dari segi ketersediaannya, sampai saat ini kita sudah sampai kepada jurusan D3. Dengan demikian, harapannya nanti pada waktu yang akan datang dalam rangka untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kualitas layanan transportasi udara, semoga saja ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk itu.

Yang berikutnya Pak Sudewo, saya senang sekali kalau beliau sering sekali memberikan kepada kita hal-hal yang penguatan-penguatan. Kami akan lakukan hal-hal, Pak Sudewo, kalau bicara cukup tidak cukup tergantung memang situasi. Tadi Pak Sekjen mengatakan skala prioritas dan juga optimalisasi, sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Memang BPSDM Perhubungan bukan satu-satunya lembaga pendidikan yang menyediakan, Pak, kompetensi-kompetensi itu. Untuk penerbangan, untuk pelayaran banyak sekolah swasta juga yang menyediakan. Hanya di darat, Pak, yang memang masih belum tersedia karena memang saat ini, ya, kita sadar untuk industri belum tersentuh banyak di bidang angkutan jalan, masih banyak mengisi di pemerintah. Semoga dengan sejalannya waktu kita akan mencoba mengembangkan kebutuhan-kebutuhan itu.

Sebagai contoh misalnya untuk pelaut itu ada tingkatan-tingkatan, penerbang juga demikian. Kalau di angkutan jalan seringkali terjadi malah lompatan-lompatan, misalnya di kampung tukang ojek tiba-tiba pindah ke kota besar jadi supir bus. Ini beda sekali sebenarnya pemahaman tanggungjawab, mungkin nanti kita akan coba untuk melengkapi itu tentunya kami mohon dukungan dari Komisi V. Untuk yang lebih detail kami akan laporkan secara tertulis.

Terima kasih, terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terakhir Ibu Irjen, singkat, Bu, ya.

Ada beberapa satu, dua pertanyaan tadi ke Ibu, terakhir kepatuhan internal saya dengar tadi teman-teman ada bicara. Silakan, Bu, yang teknis nanti tertulis.

SEKRETARIS IRJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA):

Terima kasih.

Kepada Ibu Sri Rahayu, Pak Fauzi, dan Pak Sudewo yang sudah memberi perkuatan dan mengingatkan kepada Itjen. Tentunya Itjen akan terus melakukan penguatan pengawasan, mewujudkan kematangan organisasi pemeriksa dengan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Jadi, melihat kepatuhan aturan yang ada dan bagaimana ke depan. Tentunya ini tidak hanya dalam internal Itjen, namun juga melakukan pendampingan *strategic partner* dan *trusted advisor*. Sehingga, kami berharap auditi-auditi yang ada merasa didampingi, merasa nyaman dalam bekerja, dan terhindar dari potensi-potensi kepatuhan terhadap aturan, potensi-potensi ketidakpatuhan terhadap aturan.

Ke depan kami juga memanfaatkan IT serta bantuan *remote audit*, *sistem remote audit* yang kami laksanakan selama ini. Dengan demikian, kita

harapkan pengawasan yang ada tidak hanya pengawasan *as usual* seperti yang tadi Ibu sampaikan.

Demikian, mohon arahan lanjut Bapak Pimpinan, dan Ketua, serta Anggota .

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Sekjen, Pak Kepala BPSDM, Ibu Sekretaris Irjen, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi atas penjelasan terhadap pendalaman dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI. Maka dengan demikian ya, selesailah rapat kita untuk terkait dengan pendalaman materi. Sekarang kita langsung ke kesimpulan rapat.

Baik, saya bacakan

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM Perhubungan, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Rabu, 25 Januari 2023.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM, dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dalam APBN TA 2022.
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut. Sekretariat Jenderal Realisasi Keuangan 99,58% dengan Realisasi Fisik 99,90%. Kemudian Inspektorat Jenderal Realisasi Keuangan 98,88% dan Realisasi Fisiknya 99,90%. Kemudian BPSDM Realisasi Keuangannya 99,28% dan Realisasi Fisiknya 99,89%. Badan Kebijakan Transportasi Realisasi Keuangan 99,77% dan Realisasi Fisik 99,80%.
 - b. Terhadap program atau kegiatan di Tahun 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Perhubungan, dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada Pelaksanaan Program atau Kegiatan Tahun 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Perhubungan, dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan agar meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan, agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, serta usulan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Perhubungan, dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi internal antar Unit

Organisasi Eselon I dalam penetapan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan transportasi.

Teman-teman Komisi V, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Sekjen? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan disepakatinya kesimpulan rapat kita pada sore hari ini maka selesailah rapat dengar pendapat kita dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala BPSDM, Inspektorat Jenderal, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan Pak Sekjen mewakili para Eselon I ini untuk menyampaikan kata-kata penutup.

SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARJO, MSEA):

Terima kasih, Bapak Ketua, atas kesempatannya.

**Yang saya hormati Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Atas arahan, kemudian juga bimbingan, dan juga saran, ini akan sangat memberikan manfaat yang besar kepada kami untuk bisa berkolaborasi lebih baik lagi dengan Komisi V dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita, baik di bidang APBN, maupun teknis operasi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sekali lagi, terima kasih Bapak Ketua dan semua Anggota Komisi V. Waktu dan tempat kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Sekjen.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan terima kasih atas keseriusan kita semua, terutama dari Pak Sekjen, dan BPSDM, kemudian dari Badan Kebijakan Transportasi, dan Inspektorat Jenderal beserta seluruh jajarannya, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual pada RDP, Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Saya mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka dengan demikian, selesailah rapat kita pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat saya nyatakan selesai dan ditutup.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)

JAKARTA, 25 Januari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002